

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT.....	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Judul Penelitian.....	1
1.2. Latar Belakang Masalah	1
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan	8
 BAB II STUDI LITERATUR DAN KERANGKA PEMIKIRAN	 11
2.1. Kebijakan Publik.....	11
2.2. Implementasi Kebijakan	14
2.3. Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perdatus 23 Tahun 2008.....	20
2.4. Fokus Penelitian.....	22
2.5. Kerangka Pemikiran.....	22
 BAB III METODE PENELITIAN	 23
3.1. Jenis Penelitian.....	23
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.2.1. Observasi.....	25
3.2.2. Wawancara.....	26
3.2.3. Dokumentasi	30

3.3. Teknik Analisis Data.....	30
3.4. Lokasi Penelitian.....	31
3.5. Waktu penelitian	32
3.6. Kendala-Kendala.....	32
 BAB IV PANDANGAN MASYARAKAT ADAT MENGENAI TANAH DAN HAK ULAYAT	33
4.1. Pandangan Masyarakat Adat di Biak dan Jayapura Mengenai Tanah dan Hak Ulayat.....	35
4.1.1. Kabupaten Biak Numfor	36
4.1.2. Kota Jayapura.....	39
4.2. Konflik Pertanahan di Papua	42
 BAB V IMPLEMENTASI PERDASUS 23 TAHUN 2008	51
5.1. Substansi Perdasus 23 Tahun 2008.....	51
5.1.1. Penelitian Tanah Adat	52
5.1.2. Pemetaan Tanah Adat	70
5.1.3. Pengelolaan Tanah Adat	77
5.1.4. Ganti Kerugian dan Penyelesaian Konflik Tanah	87
 BAB VI FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PERDASUS 23 TAHUN 2008	102
BAB VII PENUTUP.....	112
7.1. Kesimpulan	112
7.2. Saran	116
 DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN.....	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Informan.....	29
Tabel 2 Jumlah Kasus Sengketa yang Diajukan ke PTUN Jayapura.....	43
Tabel 3 Putusan Perkara yang Masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ...	44
Tabel 4 Jumlah Kasus Tanah yang Masuk di Pengadilan Negeri Biak Numfor.....	46
Tabel 5 Hasil Pemetaan Hutan Masyarakat Port Numbay.....	72
Tabel 6 Implementasi Perdasus 23 Tahun 2008 di Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor	98
Tabel 7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perdasus 23 Tahun 2008....	111

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Mekanisme Pengambilan Keputusan Masyarakat Adat Port Numbay	61
Bagan 2 Struktur Ondoafi Tingkat Klen Kecil (<i>Imea</i>).....	63
Bagan 3 Struktur Ondoafi Tingkat Kampung (<i>Yo</i>)	64
Bagan 4 Struktur Ondoafi Tingkat Konfederasi	65
Bagan 5 Inisiatif Pemda: Proses dari Komunikasi.....	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran	23
Gambar 2 Alur Pikir Kegiatan Pemetaan Hak Ulayat Masyarakat Port Numbay, Kota Jayapura	69
Gambar 3 Peta Hasil Pemetaan Hutan Masyarakat Port Numbay	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara	(i)
Lampiran 2 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.....	(ii)
Lampiran 3 Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor Tahun 2014 tentang Strategi Penyelesaian Konflik Pertanahan melalui Penguatan Keterlibatan Peran Adat dan Litigasi di Kabupaten Biak Numfor.	(iii)
Lampiran 4 Rangkuman hasil rapat dengan pendapat tentang pemetaan dan penatan tanah adat Papua dalam prespektif orang asli (masyarakat adat) Papua.....	(iv)
Lampiran 5 Contoh surat pelepasan tanah dari Dewan Adat Byak (Kankain Kankara Byak)	(v)
Lampiran 6 Surat-Surat Keterangan Telah Meneliti	(vi)